

# Pertamina Peroleh Pembayaran Rp 24 Triliun dari Pemerintah

Oleh **Retno Ayuningtyas**

► **JAKARTA** – PT Pertamina (Persero) akan memperoleh pembayaran kompensasi dari penjualan bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium pada tahun ini sebesar Rp 24 triliun. Pembayaran kompensasi akan memperkuat keuangan perseroan yang terdampak pandemi Covid-19 dan anjloknya harga minyak mentah dunia.

*Vice President Corporate Communication* Pertamina Fajriyah Usman menuturkan, pembayaran kompensasi penjualan Premium atau BBM penugasan oleh pemerintah itu yakni piutang kompensasi sejak 2017 lalu. Dengan adanya pembayaran kompensasi ini, dia optimistis kondisi keuangan perusahaan akan membaik. "Tentu saja pembayaran kompensasi atas penugasan tersebut akan sangat membantu *cashflow* Pertamina yang sangat terdampak secara signifikan akibat Covid-19 ini," kata dia kepada *Investor Daily*, kemarin.

Komponen pendapatan kompensasi ini muncul pertama kali dalam laporan keuangan Pertamina pada 2018 lalu. Mengacu Peraturan Presiden 43/2018, Pertamina bisa memperoleh penggantian jika menjual BBM penugasan dan subsidi pada harga eceran di bawah harga pokok produksi. Penggantian ini



**Fajriyah Usman**

diakui sebagai piutang dan pendapatan.

Dalam catatan Laporan Keuangan Pertamina 2018, tepatnya di pendapatan usaha dari aktivitas operasi lainnya,

tercatat adanya penggantian selisih harga BBM ditetapkan dan formula sebesar US\$ 3,1 miliar. Penggantian ini di luar subsidi BBM yang diterima Pertamina sebesar US\$ 5,6 miliar.

Selanjutnya pada Laporan Keuangan Pertamina untuk semester pertama 2019, juga disebutkan adanya kekurangan dan/atau pendapatan akibat perbedaan harga BBM penetapan dan harga formula. Namun belum dicantumkan besaran kompensasi tersebut lantaran masih menunggu audit. Hingga kini Pertamina belum mempublikasikan laporan keuangan 2019.

Dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) guna mengantisipasi dampak Covid-19, sesuai dokumen yang diperoleh *Investor Daily*, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 94,23 triliun untuk membayar kompensasi, termasuk diantaranya untuk Pertamina sebesar Rp 24 triliun pada tahun ini. Pembayaran kompensasi ini bentuk dukungan negara kepada BUMN.

Sebelumnya, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengungkapkan, pandemi Covid-19 menekan permintaan BBM nasional. Sejak 1 Maret lalu, penjualan rata-rata harian BBM turun signifikan, yakni 18,07% untuk bensin dan 9,11% untuk solar dibandingkan rata-rata harian di Januari dan Februari lalu. Rincinya, penjualan rata-rata harian bensin pada Maret-April ini tercatat hanya 76,65 ribu kiloliter (KL) dari normalnya 93,56 ribu KL, sementara penjualan bensin hanya 37,55



Investor Daily/Emral

## Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap

Pembangunan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Jawa-1 dengan kapasitas 1.760 MW (Proyek Jawa-1) yang rencananya akan Commercial Operation Date (COD) pada akhir tahun 2021, saat ini telah mencapai progres 71% per April di Karawang, Kamis (14/5/2020). Manajemen (PLTGU) Jawa-1 juga menerapkan sejumlah prosedur protokol kesehatan di lingkungan kerja proyek (PLTGU) Jawa-1 untuk mencegah penyebaran pandemi Covid - 19.

ribu KL dari normalnya 41,31 ribu KL.

Penurunan penjualan juga terjadi untuk pelanggan korporat. Menurut Nicke, penjualan rata-rata harian BBM industri tercatat turun 2% menjadi 32,81 ribu KL dibandingkan rata-rata harian Januari dan Februari sebesar

33,48 ribu KL. Penjualan avtur ke industri penerbangan bahkan anjlok cukup besar, yakni mencapai 48% menjadi 8,14 ribu KL dari rata-rata harian Januari dan Februari 15,7 ribu KL.

Kondisi tersebut memukul keuangan Pertamina. Nicke mengungkapkan,

skenario pertama memperkirakan adanya potensi penurunan pendapatan sebesar 38% dari Rencana Kerja dan Anggaran (RKAP) 2020 dengan asumsi harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) US\$ 38 per barel dan kurs Rp 17.500.

## Pemerintah Rombak Jajaran Direksi PLN

**JAKARTA** - Pemerintah merombak susunan direksi PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), yakni mengangkat empat direksi baru dan mengalihkan tugas tiga direksi. Sementara posisi dirut tidak berubah.

Hal ini sesuai dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PLN tanggal 14 Mei 2020 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara.

Menurut siaran pers yang diterima *Investor Daily* Kamis (14/5) malam, hasil RUPS memutuskan mengangkat dan menetapkan masing-masing yakni Muhammad Iqbal Nur sebagai sebagai Direktur Perencanaan Korporat, Bob Saril sebagai Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan, Rudy Hendra Prastowo sebagai Direktur Energy Primer, dan Muhammad Ikhsan Asaad sebagai Direktur Mega Project. Selain itu RUPS juga mengalihkan



**Zulkifli Zaini**

penugasan tiga orang direksi yakni Syofvi Felityo Roekman semula Direktur Perencanaan Korporat menjadi Direktur Human Capital dan Management, Wiluyo Kusdiharto semula Direktur Bisnis Regional Sumatera menjadi Direktur Bisnis Regional Sulawesi, dan Syamsul Huda

semula Direktur Bisnis Regional Sulawesi dan Kalimantan menjadi Direktur Bisnis Regional Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara.

Dengan penetapan ini maka susunan direksi PLN yakni Zulkifli Zaini sebagai Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo sebagai Wakil Direktur Utama PLN, Sinthya Roesly sebagai Direktur Keuangan, Syofvi Felityo Roekman sebagai Direktur Human Capital dan Management, Muhammad Iqbal Nur sebagai sebagai Direktur Perencanaan Korporat, Bob Saril sebagai Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan.

Selain itu Rudy Hendra Prastowo sebagai Direktur Energy Primer, Muhammad Ikhsan Asaad sebagai Direktur Mega Project, Wiluyo Kusdiharto sebagai Direktur Bisnis Regional Sumatera Kalimantan, Syamsul Huda sebagai Direktur Bisnis Regional Jawa, Madura dan Bali. (es)

DBS GROUP HOLDINGS LTD AND ITS SUBSIDIARIES AUDITED BALANCE SHEETS AS AT 31 DECEMBER 2019 AND 2018 (in SGD Millions)		31-Dec-19	31-Dec-18				
<b>Assets</b>							
Cash and balances with central banks		26,362	22,185				
Government securities and treasury bills		49,729	47,278				
Due from banks		39,336	40,178				
Derivatives		17,235	17,029				
Bank and corporate securities		63,746	58,197				
Loans and advances to customers		357,884	345,003				
Other assets		15,424	13,418				
Associates		835	838				
Subsidiaries		-	-				
Properties and other fixed assets		3,225	1,450				
Goodwill and intangibles		5,170	5,175				
<b>Total Assets</b>		<b>578,946</b>	<b>550,751</b>				
<b>Liabilities</b>							
Due to banks		23,773	22,648				
Deposits and balances from customers		404,289	393,785				
Derivatives		17,512	16,692				
Other liabilities		20,907	16,440				
Other debt securities		57,128	45,712				
Subordinated term debts		3,538	3,589				
<b>Total Liabilities</b>		<b>527,147</b>	<b>500,876</b>				
<b>Net Assets</b>							
		51,799	49,875				
<b>Equity</b>							
Share capital		10,948	10,898				
Other equity instruments		2,009	2,812				
Other reserves		4,102	3,701				
Revenue reserves		33,922	31,634				
<b>Shareholders' funds</b>		<b>50,981</b>	<b>49,045</b>				
Non-controlling interests		818	830				
<b>Total Equity</b>		<b>51,799</b>	<b>49,875</b>				
<b>DBS GROUP HOLDINGS LTD AND ITS SUBSIDIARIES OFF-BALANCE SHEET ITEMS AS AT 31 DECEMBER 2019 AND 2018 (in SGD Millions)</b>							
		31-Dec-19	31-Dec-18				
Contingent liabilities		28,267	24,603				
Commitments <sup>1</sup>		297,938	273,246				
Financial Derivatives		2,184,839	2,063,378				
<sup>1</sup> Includes commitments that are unconditionally cancellable at any time of \$248,258 million for 31 Dec 2019 (31 Dec 2018: \$230,291 million).							
<b>DBS GROUP HOLDINGS LTD AND ITS SUBSIDIARIES AUDITED CONSOLIDATED STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018 (in SGD Millions)</b>							
		31-Dec-19	31-Dec-18				
<b>Income</b>		15,592	13,798				
Interest income		5,967	4,843				
Net interest income		9,625	8,955				
Net fee and commission income		3,052	2,780				
Net trading income		1,459	1,178				
Net income from investment securities		334	131				
Other income		74	139				
<b>Non-interest income</b>		<b>4,919</b>	<b>4,228</b>				
<b>Total Income</b>		<b>14,544</b>	<b>13,183</b>				
Employee benefits		3,514	3,188				
Other expenses		2,744	2,628				
<b>Total expenses</b>		<b>6,258</b>	<b>5,814</b>				
<b>Profit before allowances</b>		<b>8,286</b>	<b>7,369</b>				
Allowances for credit and other losses		703	710				
<b>Profit before tax</b>		<b>7,583</b>	<b>6,659</b>				
Income tax expense		1,154	1,006				
<b>Net profit</b>		<b>6,429</b>	<b>5,653</b>				
Attributable to:							
Shareholders		6,391	5,577				
Non-controlling interests		38	76				
		6,429	5,653				
<b>DBS GROUP HOLDINGS LTD AND ITS SUBSIDIARIES AUDITED CONSOLIDATED STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018 (in SGD Millions)</b>							
		31-Dec-19	31-Dec-18				
<b>Net profit</b>		6,429	5,653				
<b>Other comprehensive income</b>							
Items that may be reclassified subsequently to income statement:							
Shareholders		(175)	(94)				
Non-controlling interests		1	3				
Gains (losses) on debt instruments classified at fair value through other comprehensive income and others		933	(105)				
Net valuation taken to equity		(403)	(151)				
Transferred to income statement		(56)	16				
Taxation relating to components of other comprehensive income		-	-				
<b>Items that will not be reclassified to income statement:</b>							
Gains (losses) on equity instruments classified at fair value through other comprehensive income (net of tax)		136	(154)				
Fair value change from own credit risk on financial liabilities designated at fair value (net of tax)		(63)	111				
<b>Other comprehensive income, net of tax</b>		<b>371</b>	<b>(374)</b>				
<b>Total comprehensive income, net of tax</b>		<b>6,800</b>	<b>5,279</b>				
Attributable to:							
Shareholders		6,761	5,201				
Non-controlling interests		39	78				
		6,800	5,279				
<b>DBS GROUP HOLDINGS LTD AND ITS SUBSIDIARIES AUDITED CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018 (in SGD Millions)</b>							
The Group	Attributable to shareholders of the Company						
	Share Capital	Other equity instruments	Other reserves	Revenue reserves	Total Shareholders' funds	Non-controlling interests	Total equity
<b>Balance at 1 January 2019</b>	10,898	2,812	3,701	31,634	49,045	830	49,875
Impact of adopting SFRS(I) 16 on 1 January 2019	-	-	-	(85) <sup>1</sup>	(85)	-	(85)
<b>Balance at 1 January 2019 after adoption of SFRS(I) 16</b>	10,898	2,812	3,701	31,539	48,959	830	48,789
Purchase of treasury shares	(114)	-	-	-	(114)	-	(114)
Draw-down of reserves upon vesting of performance shares	164	-	(164)	-	-	-	-
Cost of share-based payments	-	-	120	-	120	-	120
Dividends paid to shareholders	-	-	(3,931)	(3,931)	(3,931)	-	(3,931)
Dividends paid to non-controlling interests	-	-	-	-	-	(38)	(38)
Acquisition of non-controlling interests	-	-	-	-	-	(13)	(13)
Redemption of perpetual capital securities issued by the Company	-	(803)	-	(2)	(805)	-	(805)
Total comprehensive income	-	-	445	6,316	6,761	39	6,800
<b>Balance at 31 December 2019</b>	10,948	2,009	4,102	33,922	50,981	818	51,799
<b>Balance at 1 January 2018</b>	11,062	1,812	4,256	30,308	47,438	2,344	49,802
Impact of adopting SFRS(I) 9 on 1 January 2018	-	-	-	95	95	-	95
<b>Balance at 1 January 2018 after adoption of SFRS(I) 9</b>	11,062	1,812	4,170	30,403	47,467	2,344	49,811
Purchase of treasury shares	(303)	-	-	-	(303)	-	(303)
Draw-down of reserves upon vesting of performance shares	119	-	(119)	-	-	-	-
Cost of share-based payments	-	1,000	-	1,000	1,000	-	1,000
Dividends paid to shareholders <sup>1</sup>	-	-	112	-	112	-	112
Dividends paid to non-controlling interests	-	-	-	(4,432)	(4,432)	(87)	(4,519)
Change in non-controlling interests	-	-	-	-	-	(6)	(6)
Redemption of preference shares issued by a subsidiary	-	-	-	-	-	(1,500)	(1,500)
Total comprehensive income	-	-	(462)	5,663	5,201	78	5,279
<b>Balance at 31 December 2018</b>	10,898	2,812	3,701	31,634	49,045	830	49,875
Notes:							
<sup>1</sup> Includes distributions paid on capital securities classified as equity (2019: \$96 million; 2018: \$74 million)							
<sup>2</sup> The impact was updated to \$95 million in 4 <sup>th</sup> Quarter 2019							
Singapore, 13 February 2020 Board of Directors DBS Group Holdings Ltd							

# ACSET

member of ASTRA

## PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2020 DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT ACSET INDONESIA Tbk

Direksi PT Acset Indonesia Tbk. ("Perseroan") dengan ini melakukan pemanggilan kepada pemegang saham Perseroan ("Pemegang Saham") untuk menghadiri **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2020 ("RUPST")** dan **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RUPSLB")** (keduanya disebut sebagai "Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

**Hari / Tanggal** : Senin / 8 Juni 2020  
**Pukul** : 14.00 Waktu Indonesia Barat ("WIB") - selesai  
**Tempat** : Grand Ballroom United Tractors  
Jalan Raya Bekasi, Km 22, Jakarta Timur

### Mata Acara RUPST:

1. Persetujuan Laporan Tahunan 2019, termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2019;
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2019;
3. Perubahan Susunan Anggota Direksi Perseroan;
4. Penetapan Gaji dan Tunjangan Direksi Perseroan serta Gaji atau Honorarium dan Tunjangan Dewan Komisaris Perseroan untuk Masa Jabatan 2020-2021; dan
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020.

### Penjelasan Singkat untuk Masing-masing Mata Acara RUPST:

Mata acara pertama sampai dengan mata acara kelima merupakan mata acara rutin yang diadakan dalam setiap RUPST Perseroan.

Mata Acara No.1: Persetujuan Laporan Tahunan 2019, termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2019.

Berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") dan Pasal 19 ayat (2) huruf a dan b Anggaran Dasar Perseroan, Laporan Tahunan Perseroan memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), dimana termasuk di antaranya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan yang memerlukan pengesahan RUPS.

Mata Acara No.2: Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2019.

Berdasarkan Pasal 71 ayat (1) UUPT dan Pasal 19 ayat (2) huruf c Anggaran Dasar Perseroan, penetapan penggunaan laba bersih diputuskan dalam RUPS.

Mata Acara No.3: Perubahan Susunan Anggota Direksi Perseroan.

Berdasarkan Pasal 36A ayat (1) UUPT dan Pasal 19 ayat (2) huruf e Anggaran Dasar Perseroan, pengangkatan dan/atau penggantian anggota Direksi memerlukan persetujuan RUPS.

Mata Acara No.4: Penetapan Gaji dan Tunjangan Direksi Perseroan serta Gaji atau Honorarium dan Tunjangan Dewan Komisaris Perseroan untuk Masa Jabatan 2020-2021.

Berdasarkan Pasal 96 ayat (1) jo. Pasal 113 UUPT dan Pasal 11 ayat (8) jo. Pasal 14 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan, (i) besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dan dapat didelegasikan kepada Dewan Komisaris dan (ii) pemberian gaji atau honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.

Mata Acara No.5: Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020.

Berdasarkan Pasal 36A ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka jo. Pasal 19 ayat (2) huruf d Anggaran Dasar Perseroan, penunjukan kantor akuntan publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan membutuhkan persetujuan RUPS.

### Mata Acara RUPSLB:

1. Perubahan Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan mengenai Modal Dasar Perseroan;
2. Persetujuan atas Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD"); dan
3. Perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan mengenai Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan.

### Penjelasan Singkat untuk Masing-masing Mata Acara RUPSLB:

Mata Acara No.1: Perubahan Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan mengenai Modal Dasar Perseroan.

Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) UUPT jo. Pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan, perubahan Anggaran Dasar Perseroan ditetapkan oleh RUPS.

Mata Acara No.2: Persetujuan atas Penambahan Modal Dengan Memberikan HMETD.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 jo. Pasal 41 ayat (1) UUPT jo. Pasal 4 ayat (4) dan (5) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, penambahan modal dengan HMETD membutuhkan persetujuan RUPS.

Mata Acara No.3: Perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan mengenai Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan.

Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) UUPT jo. Pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan, perubahan Anggaran Dasar Perseroan ditetapkan oleh RUPS.

### Catatan:

1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan Rapat.
2. Bahan mata acara Rapat, telah tersedia di kantor pusat Perseroan, beralamat di ACSET Building, Jalan Majapahit No. 26, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat 10160 ("Kantor Pusat Perseroan") terhitung sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan tanggal 8 Juni 2020 pukul 09.00 WIB. Bahan Rapat dapat diperoleh dari Perseroan pada jam kerja dan atas permintaan tertulis dari Pemegang Saham melalui email (email: [corporate.secretary@acset.co](mailto:corporate.secretary@acset.co)). Laporan Tahunan Perseroan dan daftar riwayat hidup calon anggota Direksi Perseroan juga tersedia di situs web Perseroan (<https://www.acset.co/id/investor/rups/2020>).
3. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 14 Mei 2020 pada jam penutupan perdagangan saham atau bagi Pemegang Saham yang namanya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada jam penutupan perdagangan saham pada tanggal 14 Mei 2020.
4. a. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat agar memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya yang sah dan menyerahkan fotokopinya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.  
b. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum agar menyerahkan fotokopi Anggaran Dasarnya yang terakhir (berserta pengesahan dari atau pelaporan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) serta akta notaris tentang pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus terakhir (berserta buku penunjukan pembentukan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) kepada petugas pendaftaran.
5. a. Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa (dengan hak substitusi) yang bentuk dan isinya disetujui oleh Direksi Perseroan. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun tidak berhak mengeluarkan suara dalam pemungutan suara. Pemegang saham yang alamatnya terdaftar di Luar Republik Indonesia, surat kuasanya harus dilegalisasi oleh notaris/pejabat berwenang setempat dan oleh Kedutaan Besar/Perwakilan Republik Indonesia setempat.  
b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh selama jam kerja di Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Sinartama Gunita ("Sinartama"), melalui email [helpdesk@sinartama.co.id](mailto:helpdesk@sinartama.co.id), nomor telepon: (+62 21) 3922332, nomor faksimili: (+62 21) 3923003, atau *Corporate Secretary Perseroan*, melalui email [corporate.secretary@acset.co](mailto:corporate.secretary@acset.co). Formulir surat kuasa dapat juga diunduh pada situs web Perseroan (<https://www.acset.co/id/investor/rups/2020>).
6. Semua surat kuasa yang sudah sesuai dengan persyaratan harus sudah diterima oleh Sinartama atau Corporate Secretary Perseroan selambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS yaitu pada tanggal 5 Juni 2020 pada pukul 12.00.
7. Satu saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang Pemegang Saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, suara yang dikeluarkan berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya.
8. Untuk memperlancar pengaturannya dan terbitnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
9. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Perseroan telah menyediakan alternatif bagi pemegang saham untuk memberikan kuasa secara elektronik kepada pihak independen melalui sistem eASYKSEI yang dikelola oleh KSEI ("E-Proxy"). Pihak independen yang ditunjuk Perseroan adalah Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu Sinartama.

### PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS COVID-1